

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 6, Maret 2025

Mengoptimalkan Penanaman Modal Asing dalam Mencapai Indonesia Emas 2045

p.3

Tantangan Bantuan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial

p.8

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Penanggung Jawab

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Mengoptimalkan Penanaman Modal Asing dalam Mencapai Indonesia Emas 2045

p.3

Penanaman Modal Asing menjadi salah satu upaya strategis untuk mencapai visi pendapatan per kapita setara negara maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kestabilan politik. DPR RI melalui Komisi X perlu mendorong pemerintah fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini serta merealisasikan mandatory spending anggaran pendidikan; Komisi V DPR RI agar mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur; dan Komisi III DPR RI perlu mendorong Kepolisian RI untuk menertibkan anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat untuk terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat.

Tantangan Bantuan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial

p.8

Penduduk Indonesia telah mengalami penuaan penduduk. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU), dan Sembako/BPNT guna mengurangi kemiskinan lansia. Bansos lansia Kemensos saat ini masih menghadapi tantangan diantaranya cakupannya masih terbatas, masih terjadi inclusion dan exclusion error, dan tantangan akurasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN). Oleh karena itu, Komisi VIII Bersama pemerintah perlu segera melakukan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah masuk dalam prolegnas. Kemensos juga perlu memperluas cakupan penerima program bansos lansia, perlunya perbaikan data lansia dalam penyaluran bansos PKH, atensi LU dan sembako lansia serta perlunya partisipasi aktif masyarakat dan pendamping sosial untuk menjamin akurasi dan validasi data DTSEN.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 7**

***Dukungan APBN Terhadap
Kesejahteraan Hakim Di Indonesia***

Perdagangan Karbon

Mengoptimalkan Penanaman Modal Asing dalam Mencapai Indonesia Emas 2045

Leo Iskandar*)

Abstrak

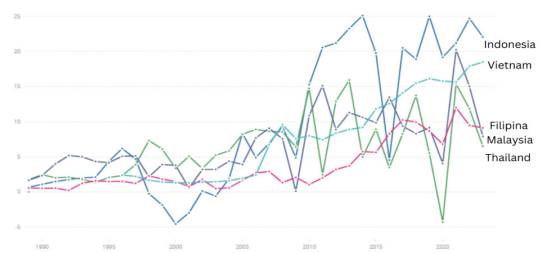
Penanaman Modal Asing menjadi salah satu upaya strategis untuk mencapai visi pendapatan per kapita setara negara maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kestabilan politik. DPR RI melalui Komisi X perlu mendorong pemerintah fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini serta merealisasikan mandatory spending anggaran pendidikan; Komisi V DPR RI agar mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur; dan Komisi III DPR RI perlu mendorong Kepolisian RI untuk menertibkan anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat untuk terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat.

Salah satu sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 adalah pendapatan per kapita yang setara negara maju. Pendapatan nasional per kapita atau *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tahun 2023 adalah sebesar USD4.810 (World Bank, n.d.). Sementara rata-rata GNI per kapita negara G7 tahun 2023 adalah USD51.349. Jika dibandingkan dengan GNI per kapita Singapura tahun 2023 sebesar USD70.590, maka GNI per kapita Indonesia hanya 7 persen saja. Salah satu langkah strategis untuk mencapai visi tersebut adalah melalui penanaman modal asing (PMA). PMA pada suatu negara memberikan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kualitas institusi pada negara penerima PMA (Amri, 2016). Institusi yang dimaksud mencakup beragam institusi pemerintah maupun swasta, seperti institusi politik, hukum, legislatif, ekonomi, keuangan, keagamaan, akademik dan ilmiah. Kenaikan kualitas institusi pada berbagai sektor tersebut pada akhirnya berperan sebagai pendorong pendapatan nasional (Xholo et al., 2025).

PMA Indonesia tahun 2023 sebesar USD22,09 miliar turun dibandingkan dengan PMA tahun 2014 sebesar

USD25,12 miliar (Gambar 1). Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina, Vietnam menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari sebesar USD9,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD18,5 miliar di tahun 2023 atau meningkat sebesar 101%. Jika dibandingkan pada rentang yang lebih lebar, PMA Vietnam di tahun 2023 adalah 4.624 kali lebih besar dari PMA di tahun 1989, jauh lebih besar dari peningkatan PMA Indonesia sebesar 31,39 kali untuk periode yang sama.

Gambar 1. Arus Masuk PMA di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam Tahun 1989-2023

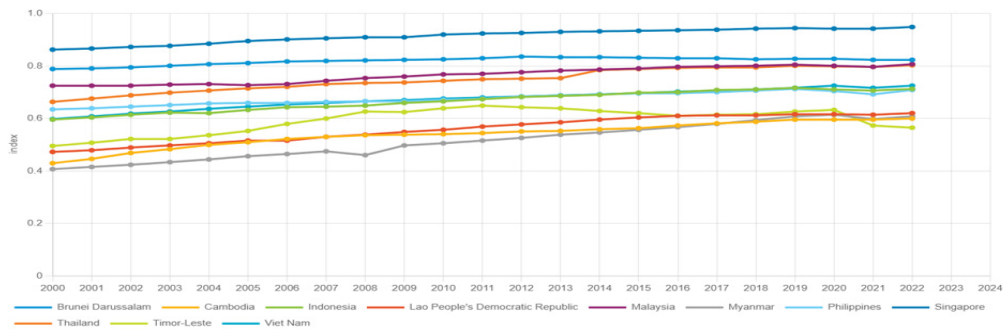


Sumber: World Bank, 2025

Arus masuk PMA yang masuk ke suatu negara dipengaruhi oleh beragam faktor seperti ukuran dan karakteristik pasar, faktor biaya, faktor proteksi, risiko, dan variabel kebijakan, serta keunggulan perusahaan seperti diferensiasi produk, keahlian manajerial, teknologi atau paten baru (Faeth, 2009). Campur

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Negara ASEAN Tahun 2000-2022



Sumber: Asian Development Bank, 2025

tangan pemerintah juga diperlukan untuk memberikan insentif investasi baik berupa insentif fiskal maupun kebijakan (Faeth, 2009). Penelitian lain menemukan bahwa ukuran pasar suatu negara belum tentu merupakan faktor penentu investor asing untuk berinvestasi di suatu negara, melainkan *free trade agreement* yang didukung oleh faktor fundamental seperti nilai tukar yang stabil, kualitas sumber daya manusia dengan harga yang murah, infrastruktur, dan kestabilan politik (Duong et al., 2020).

Sumber daya manusia, infrastruktur, dan kestabilan politik merupakan indikator penting yang memengaruhi PMA (Asiedu, 2006). Tulisan ini akan fokus kepada tiga faktor dasar yang menjadi tantangan Indonesia dalam meningkatkan arus masuk PMA, yaitu: sumber daya manusia, infrastruktur, dan kestabilan politik melalui pendekatan studi komparatif dengan negara ASEAN seperti Vietnam untuk melihat pola keberhasilan investasi asing di negara yang memiliki kesamaan struktur ekonomi.

Tantangan Sumber Daya Manusia di Indonesia

Kuantitas dan kualitas pendidikan merupakan beberapa komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. Saat ini Indonesia tengah menghadapi pelambatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis PBB tahun 2022, posisi Indonesia dengan skor 0,713 berada di bawah Vietnam dengan skor

0,726 (Gambar 2). Posisi Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti di mana sejak tahun 2000 secara rata-rata berada di bawah Vietnam. Padahal pada rentang tahun 1990-1997, posisi Indonesia berada di atas Vietnam dengan perbedaan hingga 0,034 (UNDP, n.d.).

Persentase penduduk tamatan SMP dan SMA di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan di Vietnam. Persentase anak-anak yang menamatkan sekolah dasar di Indonesia dan Vietnam masing-masing sebesar 96,64 persen dan 96,60 persen; persentase remaja yang menamatkan sekolah menengah pertama di Indonesia dan Vietnam masing-masing sebesar 88,08 persen dan 83,70 persen; dan persentase anak muda yang menamatkan sekolah menengah atas di Indonesia dan Vietnam masing-masing sebesar 63,15 persen dan 55,50 persen (UNICEF, 2022). Data UNICEF tersebut menyasar responden survey pada rentang umur 3-5 tahun lebih tua dari usia yang diharapkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan terakhir pada setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan perbandingan dengan Vietnam, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Pertama, pemerintah Vietnam terlihat lebih mampu merealisasikan target kebijakannya di bidang pendidikan, yaitu wajib belajar 5 tahun, dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Realisasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Indonesia masih jauh dari target. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPS (2024) yang menyasar penduduk usia 15 tahun ke

atas, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia tahun 2024 yang menamatkan pendidikan jenjang SMA ke atas bahkan hanya sebesar 41,05 persen.

Kedua, pemerintah Vietnam nampak berfokus kepada pendidikan pada tahap awal fase pembelajaran anak-anak, terlihat dari usia memasuki pendidikan dasar di Vietnam yang dimulai lebih awal, yaitu usia 6 tahun, dibandingkan dengan usia memasuki pendidikan dasar di Indonesia secara umum pada umur 7 tahun. Persentase partisipasi pra-sekolah di Vietnam tahun 2021 sebesar 92,45 persen (World Bank, n.d.), sedangkan di Indonesia hanya sebesar 36,77 persen pada tahun 2024 (BPS, 2024). Selain ukuran kuantitas seperti tahun pendidikan, ukuran kualitas seperti karakteristik anak yang diukur pada saat memasuki sekolah dasar juga merupakan faktor penting dalam menjelaskan kualitas manusia dewasa di masa depan (Currie & Almond, 2011). Adapun kualitas sumber daya manusia merupakan faktor dasar yang memengaruhi arus masuk PMA ke dalam suatu negara (Duong et al., 2020).

Indonesia sendiri memiliki komitmen yang besar di bidang pendidikan, dimana hal tersebut tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalokasikan sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Namun, Indonesia saat ini menghadapi tantangan merealisasikan amanat Undang-Undang tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 berdampak kepada efisiensi anggaran pendidikan. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 berkurang sebesar Rp7,27 triliun (21,68 persen) dari Rp33,55 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp14,31 triliun (24,81 persen) dari Rp57,68 triliun menjadi Rp43,37 triliun (Komisi X DPR RI Channel, 2025).

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Nilai infrastruktur Indonesia di antara negara-negara ASEAN berada pada peringkat paling bawah. Dengan rentang nilai antara 0 dan 5, laporan Navigating High Winds: Southeast Asia Outlook 2024-2034 menunjukkan nilai infrastruktur Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia masing-masing sebagai berikut: 4,6; 3,7; 3,6; 3,2; 3,2; dan 2,9. Indikator yang diukur berkaitan dengan kualitas infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik dan sistem teknologi informasi. Kualitas infrastruktur Indonesia dinilai stagnan sejak 2018 dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Padahal, infrastruktur berpengaruh terhadap minat investasi investor asing, di mana infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan kinerja logistik suatu negara (World Bank, 2023).

RPJMN 2020-2024 menargetkan 3.000 km jalan nasional baru pada tahun 2024, yang juga merupakan target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024. Realisasi panjang jalan nasional baru pada tahun 2024 adalah sebesar 2.917,24 km atau terdapat selisih 82,76 km (2,76 persen) yang tidak tercapai (Kementerian PUPR, 2021-2025). Di luar dari target kuantitas, pemerintah juga harus memperhatikan kualitas dari jalan yang dibangun. Kementerian PUPR di tahun 2024 melakukan revisi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 yang berdampak kepada perubahan target kinerja, antara lain waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang semula ditargetkan selama 1,9 jam/100 km menjadi 2,14 jam/100 km. Penyesuaian target kinerja ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas jalan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama bagi kendaraan untuk melaluinya. Pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran yang berdampak juga kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang

mengalami efisiensi anggaran TA 2025 sebesar Rp60,47 triliun (54,50 persen) dari Rp110,95 triliun menjadi Rp50,48 triliun (Tempo, 2025).

Tantangan Kestabilan Politik di Indonesia

Indikator kinerja pemerintahan negara-negara di dunia berdasarkan World Development Indicators mencakup *control of corruption; government effectiveness; regulatory quality; rule of law; voice and accountability; political stability and absence of violence/terrorism*. Peringkat Indonesia yang paling rendah dari keenam indikator tersebut berada pada indikator *political stability and absence of violence/terrorism*, yang mana merupakan salah satu indikator dasar dalam mendorong peningkatan arus masuk PMA di Vietnam (Duong et al., 2020). Indikator kestabilan politik Indonesia tahun 2014-2023 berfluktuasi pada rentang peringkat persentil 24 dan 32, sedangkan Vietnam berada pada rentang peringkat persentil 43 dan 55 (World Bank, n.d.).

Indikator kestabilan politik mengukur persepsi kemungkinan terjadinya ketidakstabilan politik atau aksi kekerasan yang didorong isu politik atau agama, termasuk unjuk rasa dan terorisme, terutama jika hal ini mengganggu pergerakan normal, operasi bisnis, dan aktivitas masyarakat. Terdapat 76 kasus mogok kerja atau unjuk rasa di Indonesia dari Januari hingga April 2024 yang melibatkan 2.370 tenaga kerja dan menyebabkan 18.960 jam kerja hilang (Kemnaker, 2024). Di Jakarta sendiri ada 2.353 kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2023 (BeritaSatu, 2023). Ditambah lagi dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan baik berlatar belakang keagamaan maupun non-keagamaan dengan tujuan antara lain mencari keuntungan ekonomi namun dengan merugikan pihak lain (Wibowo & Harefa, 2015).

Unjuk rasa menjadi salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan perhatian sehingga aspirasinya dapat

didengar dan direalisasikan. Sedangkan aksi kekerasan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan merupakan wujud nyata dari lemahnya penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Rekomendasi

Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan arus masuk PMA. **Pertama**, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengintensifkan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan pra-sekolah bagi anak-anak dan mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 yang mengatur persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD menjadi berusia 6 tahun sebelum dimulainya pembelajaran hari pertama, dengan pengecualian persyaratan usia hingga usia 10 tahun. Selanjutnya, Komisi X DPR RI agar mendorong pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan tahun 2025 sesuai amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur seperti jalan sehingga meminimalkan risiko perbaikan jalan yang rusak. **Ketiga**, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk dapat merumuskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan dan masa depan rakyat secara keseluruhan. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong Kepolisian RI untuk menertibkan anggota organisasi masyarakat yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat untuk terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Daftar Pustaka

- ADB. (2025). Key Indicators Database. Diakses pada 7 Maret 2025 melalui: <https://kidb.adb.org/>
- Amri, F. (2016). The Relationship Amongst Energy Consumption, Foreign Direct

Investment and Output in Developed and Developing Countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 64, 694-702.

Angsana Council, Bain & Company, & DBS Bank. (2024). *Navigating High Winds: Southeast Asia Outlook 2024-2034*.

Asiedu, E. (2006). Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions and political instability. *World Economy*, 29(1), 63-77.

BeritaSatu. (2023). Unjuk Rasa di Jakarta Meningkat, Polda Metro Jaya Tersibuk di Dunia? Diakses melalui: <https://www.beritasatu.com/nasional/2791338/unjuk-rasa-di-jakarta-meningkat-polda-metro-jaya-tersibuk-di-dunia>

BPS. (2024). Indikator Pendidikan, 1994-2024. Diakses melalui: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan--1994-2024.html>

Currie, J., & Almond, D. (2011). Human capital development before age five. *Handbook of labor economics* (Vol. 4, pp. 1315-1486). Elsevier.

Duong, M., Holmes, M. J., & Strutt, A. (2020). The impact of free trade agreements on FDI inflows: the case of Vietnam. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26(3), 483-505.

Faeth, I. (2009). Determinants of foreign direct investment—a tale of nine theoretical models. *Journal of Economic Surveys*, 23(1), 165-196.

Kementerian PUPR. (2021-2025). *Laporan Kinerja Kementerian PUPR 2020-2024*.

Kemnaker. (2024). Mogok Kerja, April Tahun 2024. Diakses melalui: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1818>

Komisi X DPR RI Channel. (2025). *Breaking News - Komisi X DPR RI Raker dengan Pemerintah*. Diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=oPAWxJjH9Qg>

Tempo. (2025). *Rekonstruksi, Anggaran Kementerian PU 2025 Ditetapkan jadi Rp50,48 Triliun*. Diakses melalui: <https://www.tempo.co/ekonomi/rekonstruksi-anggaran-kementerian-pu-2025-ditetapkan-jadi-rp-50-48-triliun-1206593>

UNDP. (2025). *Human Development Index (HDI)*. Diakses pada 7 Maret 2025 melalui: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>

UNICEF. (2022). *Education Overview*. Diakses pada 7 Maret 2025 melalui: <https://data.unicef.org/topic/education/overview/#notes>

Wibowo, C. dan Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1-20.

World Bank. (n.d.). *Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)*. Diakses pada 6 Maret 2025 melalui: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD>

World Bank. (n.d.). *GNI per capita*. Diakses pada 10 Maret 2025 melalui: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=ID>

World Bank. (n.d.). *World Development Indicators*. Diakses pada 7 Maret 2025 melalui: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

World Bank. (2023). *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy*. Diakses melalui: <https://lpi.worldbank.org/>

Xholo, N., Ncanywa, T., Garidzirai, R., & Asaleye, A. J. (2025). *Promoting Economic Development Through Digitalisation: Impacts on Human Development, Economic Complexity, and Gross National Income*. *Administrative Sciences*, 15(2), 50.

Tantangan Bantuan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial

Martha Carolina*)

Abstrak

Penduduk Indonesia telah mengalami penuaan penduduk. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Sosial (ATENSI LU), dan Sembako/BPNT guna mengurangi kemiskinan lansia. Bansos lansia Kemensos saat ini masih menghadapi tantangan diantaranya cakupannya masih terbatas, masih terjadi inclusion dan exclusion error, dan tantangan akurasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN). Oleh karena itu, Komisi VIII Bersama pemerintah perlu segera melakukan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah masuk dalam prolegnas. Kemensos juga perlu memperluas cakupan penerima program bansos lansia, perlunya perbaikan data lansia dalam penyaluran bansos PKH, atensi LU dan sembako lansia serta perlunya partisipasi aktif masyarakat dan pendamping sosial untuk menjamin akurasi dan validasi data DTSEN.

Penduduk Indonesia secara demografi mengalami penuaan penduduk (ageing population). Persentase lanjut usia (lansia) telah mencapai 12 persen lebih dari 10 persen yang menyebabkan Indonesia mengalami struktur demografi penduduk tua (BPS, 2024). Jumlah penduduk lansia 60-64 tahun sebesar 11.490,3 ribu jiwa, usia 65-69 tahun sebesar 8.528,4 ribu jiwa, usia 70-74 tahun sebesar 5.615,8 ribu jiwa dan usia 75+ sebesar 5.307,7 jiwa (BPS, 2024). Persentase jumlah penduduk lansia terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 8,97 persen dari total jumlah penduduk tahun 2017 meningkat menjadi 12 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2024.

Persentase penduduk lansia yang meningkat menyebabkan tantangan karena lansia dianggap kurang produktif akibat kesehatan dan kualitas hidup (Basrowi et, al, 2021). Penduduk lansia juga rentan miskin disebabkan masalah ekonomi (Triyanto & Panjawa, 2020). Faktor utama yang menjadikan lansia rentan yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, masalah kesehatan, dan membutuhkan pendamping sebagai pengasuh (caregiver) (Bloom, et, al, 2011). Sementara itu, fakta menunjukkan bahwa sebagian lansia hidup dengan

kesejahteraan yang rendah. Sekitar 11 persen lansia dalam kondisi miskin dan lebih dari 60 persen tinggal bersama anggota keluarga lain yang kemungkinan besar bertindak sebagai perawat atau pengasuhnya. Selain itu, pengeluaran bulanan rata-rata keluarga dengan lansia diperkirakan 3 persen lebih tinggi daripada keluarga tanpa lansia (TNP2K, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan kebijakan lansia. Peraturan perundang-undangan lansia yaitu Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi lansia Potensial, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial lansia.

Berbagai peraturan lansia saat ini dianggap masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada karena masih berfokus pada aspek

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

finansial bagi lansia (Akbar et, al, 2023). UU No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia juga masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya masih berfokus pada bansos namun belum memposisikan lansia sebagai masyarakat yang perlu dibantu karena bansos dipandang sebagai upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial tetap dapat meningkatkan taraf kesejahteraan potensialnya sesuai pasal 20 UU No.13 tahun 1998 (Pardomuan dan irwan, 2024), masih ada ketidakjelasan pengimplementasian layanan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat lansia karena masih terbatas pada penyuluhan dan penguatan lembaga penyakit kronis (Tuwu & Tarifu, 2023). Begitupula, pasal 52 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik lansia dan belum ada kejelasan siapa pihak yang paling bertanggungjawab pada lansia.

Bansos Lansia Kementerian Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan Lansia

Kementerian sosial (Kemensos) sudah memiliki sejumlah program bansos untuk lansia. Program bansos lansia Kemensos diantaranya Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Atensi LU), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bansos lansia yang ada saat ini masih belum memecahkan permasalahan yang ada seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian kerabat/keluarga hal ini disebabkan oleh potensi kesejahteraan sosial yang berbasis keluarga masih belum optimal (Haerudin, 2022).

Program ATENSI LU dimulai sejak tahun 2021. Program Atensi LU dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial lansia. Sasaran ATENSI LU meliputi lansia, keluarga, dan masyarakat. Kriteria lansia penerima ATENSI LU adalah lansia yang mengalami kereatanan masalah

sosial dan diskriminasi serta lansia yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Tahap mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan penyaluran langsung kepada lansia dan penyaluran melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial. Rumah tangga lansia yang memperoleh Atensi LU jumlahnya masih sedikit hanya 6 persen (BPS, 2024).

Program Sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat miskin dan rentan untuk mengurangi beban pengeluaran. Program sembako mulai tahun 2020 yang merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Beras untuk Keluarga Prasejahtera (Rastra)/Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)/Operasi Pasar Khusus (OPK). Indeks bantuan program semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Persentase rumah tangga lansia yang mendapat program sembako hanya sebesar 25,89 persen (BPS, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bansos bersyarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miskin/rentan. Bansos yang paling banyak diterima lansia adalah PKH komponen lansia. Besarnya bantuan PKH lansia tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulan menggunakan kartu debit Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui rekening bank penyalur. Perkembangan kebijakan PKH lansia mengalami perubahan selama tahun 2016-2024 yaitu cakupan usia, jumlah lansia dalam satu KPM, jumlah bantuan, dan unit sasaran (tabel 1).

Bansos dapat mengurangi kemiskinan lansia (Vu & Nguyen, 2021). Bansos lansia menjamin pendapatan minimal tertentu lansia yang memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar serta berdampak pada penurunan

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan PKH Komponen Lansia

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lansia usia 70 tahun ke atas	Lansia usia 70 tahun ke atas	Lansia usia 60 tahun ke atas	Lansia 60 tahun ke atas	Lansia 70 tahun ke atas	Lansia 70 tahun ke atas	Lansia 70 tahun ke atas	Lansia 70 tahun ke atas	Lansia 70 tahun ke atas
Bantuan Rp2,4 Juta per jiwa/tahun	Bantuan flat Rp2,4 Juta per jiwa/tahun	Bantuan flat Rp 2 juta per keluarga per tahun	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per bulan. Sejak April menjadi Rp 3 juta	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun. Indeks/ 3 bulan sebesar	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun. Indeks/ 3	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun. Indeks/ 3 bulan sebesar Rp600.000	Bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun. Indeks/ 3 bulan sebesar Rp600.000
Maksimum 2 lansia per keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga	Hanya dalam keluarga (yang memiliki komponen kesehatan dan atau pendidikan)	Maksimal 1 lansia per keluarga	Maksimal 1 lansia per keluarga	Maksimal 1 lansia per keluarga	Maksimal 1 lansia per keluarga	Maksimal 1 lansia per keluarga
Perseorangan atau dalam keluarga			Bantuan komponen (kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan	Perseorangan atau dalam keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga	Perseorangan atau dalam keluarga
Kepmensos No. 23/ HUK/2016 tentang Indeks dan Komponen Bansos PKH Tahun 2016	10 Tahun 2017 tentang PKH • SK Ditjen Linjamsos No. 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan Komponen	Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH • Kemensos, Petunjuk Teknis PKH Tahun 2018	Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH • Kemensos, Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019	• Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH • Kemensos, Petunjuk Teknis PKH Tahun 2020	Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.02.01/02/2022	Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 09/3/BS.02.01/02/2022	Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 09/3/BS.02.01/02/2022	Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 08/3/BS.00.01/01/2023

Sumber: Kemensos 2024, diolah

angka kemiskinan lansia (TNP2K, 2020). Skema bansos lansia yang telah dilakukan di beberapa daerah berdampak cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan pada kelompok usia 70 tahun ke atas (TNP2K, 2020). Sistem bansos lansia yang komprehensif diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan. Simulasi dampak bansos lansia usia 65 tahun ke atas sebesar Rp300.000 per bulan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan nasional menjadi 9,4 persen, jika bansos lansia sebesar Rp600.000 per bulan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,8 persen (TNP2K, 2020).

Bansos lansia digunakan oleh negara berpendapatan tinggi, menengah dan negara miskin untuk memutus kemiskinan. Sebagai contoh Negara Nepal sebagai salah satu negara termiskin di Asia mengalokasikan 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk bansos lansia usia 65 tahun ke atas dan Lansia perempuan usia 60 tahun yang hidup sendiri. Negara berpendapatan menengah lainnya telah mengalokasikan bansos lansia sekitar 14,6 persen dari PDB per kapitanya (TNP2K, 2020).

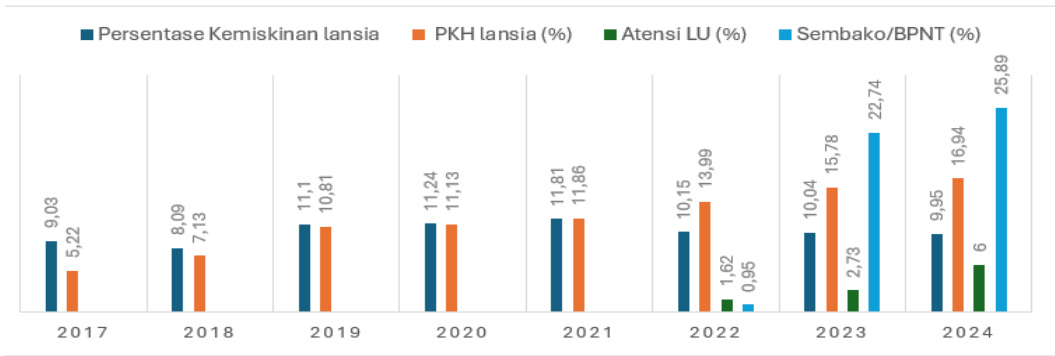
Beberapa hasil penelitian bansos berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Waluyo (2021) PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia untuk

daerah tertinggal pengaruhnya lebih kecil dibanding daerah non tertinggal. Hal ini dapat terjadi karena kondisi kedalaman kemiskinan daerah tertinggal lebih tinggi dengan faktor aksesibilitas yang sulit, faktor inclusion error dan exclusion error yang cukup tinggi, pendidikan yang rendah dibanding daerah non tertinggal. Penelitian Kemensos (2025) PKH telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga 2,2 persen. BPNT/ Program sembako memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan lansia, begitupula (Kuntarto et al, 2023).

Tingkat kemiskinan lansia pada tahun 2024 sebesar 9,95 persen telah mencapai target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 untuk mencapai lansia mandiri yaitu kemiskinan dibawah 10 persen, namun ketimpangan lansia masih terjadi khususnya pada wilayah perdesaan sebesar 12,43 persen, lansia perempuan sebesar 10,49 persen, dan lansia disabilitas 14,75 persen (BPS, 2024). Tingkat lansia sebesar 14,75 persen menunjukkan bahwa lansia mengalami tiga kerentanan sekaligus yaitu rentan karena menjadi lansia, rentan penyandang disabilitas, dan rentan karena mengalami kemiskinan.

Persentase penerima bansos Kemensos

Tabel 1. Persentase Kemiskinan dan Persentase Bansos Kemensos Lansia



Sumber: BPS (2024)

untuk lansia semakin meningkat (Gambar 1). Persentase penerima PKH lansia pada tahun 2017 sebesar 5,22 persen meningkat sebesar 11,72 persen pada tahun 2024 sebesar 16,94 persen. Persentase penerima ATENSI LU tahun 2022 sebesar 1,62 persen meningkat 4,38 persen pada tahun 2024, persentase penerima sembako/BPNT lansia tahun 2022 sebesar 0,95 persen meningkat 24,94 persen pada tahun 2024 sebesar 25,89 persen (Gambar 1). Di sisi lain, persentase penerima bansos PKH yang meningkat tidak selalu menurunkan kemiskinan (Gambar 1). Persentase Penerima PKH lansia pada tahun 2017 sebesar 5,22 persen dengan tingkat kemiskinan lansia sebesar 9,03 persen. Penerima PKH lansia tahun 2021 pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,81 persen namun kemiskinan lansia juga meningkat menjadi 11,1 persen (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bansos lansia yang diberikan pemerintah masih belum sepenuhnya efektif dan bansos lansia tidak semata-mata langsung mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin.

Tantangan Bansos Lansia Kemensos

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR Beberapa tantangan bansos lansia Kemensos diantaranya: program bansos Kemensos cakupannya masih terbatas, inclusion dan exclusion error masih terjadi, dan akurasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN) masih perlu partisipasi masyarakat.

Pertama, program bansos Kemensos cakupannya masih terbatas. Program-program perlindungan sosial yang diterima oleh lansia mampu memberikan dampak pada lansia antara lain meningkatkan martabat lansia, meningkatkan kondisi kesehatan lansia, dan menambah pendapatan rumah tangga lansia. Bantuan yang paling banyak diterima lansia, yakni PKH lansia dan bantuan pangan non tunai. Rata-rata nilai bansos yang diterima lansia sebesar Rp400.000 berasal dari bansos PKH lansia sebesar Rp200.000,00 per bulan dan bansos Sembako/BPNT sebesar Rp200.000 masih dibawah garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan (BPS, 2024). Nilai bansos Kemensos yang diterima lansia juga masih dibawah garis kemiskinan ekstrim sebesar Rp450.000 per bulan ($USD\ 1,9/Kapita/Hari\ PPP\ X\ kurs\ 15.899 = Rp450.000$).

Kedua, penetapan dan penyaluran bansos lansia Kemensos masih terjadi *inclusion error* dan *exclusion error*. Penetapan penyaluran bansos PKH lansia tidak sesuai ketentuan (BPK, 2023). Berdasarkan uji petik di lapangan terhadap KPM PKH lansia Provinsi Jawa Barat terdapat KPM yang telah meninggal sejak tahun 2018 namun tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sehingga KPM yang memiliki komponen lansia tersebut masih menerima bantuan PKH sampai triwulan II tahun 2023 yang diambil oleh salah satu anggota keluarga. Begitupula, hasil

pemeriksaan terhadap penetapan dan penyaluran bansos PKH lansia tahap I s.d tahap III terhadap 5.2551 KPM berusia 90 tahun ke atas belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat penetapan dan penyaluran bansos kepada KPM yang sudah meninggal dunia sebanyak 5.080 KPM (96,74 persen), hilang dan tidak ditemukan sebanyak 97 KPM (1,85 persen) dan pindah alamat sebanyak 74 KPM (1,41 persen). Penetapan dan penyaluran bansos sembako lansia juga tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan ditemukan bukti pengembalian kas ke negara atas pengembalian bansos sembako oleh KPM lansia yang disebabkan oleh beberapa alasan yaitu KPM sudah meninggal dunia, KPM tidak mengetahui adanya informasi penyaluran, KPM menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dll. Begitupula, penyaluran bansos ATENSI LU masih ada di luar wilayah kerja sentra (BPK, 2023).

Ketiga, akurasi dan validasi DTSEN masih perlu partisipasi masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. DTSEN bertujuan memastikan bansos lebih tepat sasaran, pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan. DTKS Kemensos tidak berlaku sejak Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. DTSEN sebagai basis data baru mencakup seluruh penduduk Indonesia yang menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi. Di sisi lain, keberhasilan DTSEN masih mengalami tantangan yaitu partisipasi aktif masyarakat dan pendamping sosial dalam perubahan data seperti penambahan, penghapusan, dan perbaikan data. Perbaikan data dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal melalui pemerintahan desa atau kelurahan dan jalur partisipasi masyarakat melalui platform digital yang telah disediakan.

Rekomendasi

Bansos lansia Kemensos diharapkan dapat mengurangi kemiskinan lansia. Oleh karena itu, Komisi VIII Bersama pemerintah perlu segera melakukan revisi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah masuk dalam prolegnas. Kemensos juga perlu memperluas cakupan penerima program bansos lansia, perlunya perbaikan data lansia dalam penyaluran bansos PKH, atensi LU dan sembako lansia serta perlunya partisipasi aktif masyarakat dan pendamping sosial untuk menjamin akurasi dan validasi data DTSEN.

Daftar Pustaka

- Akbar, M., Nulhaqim, S. A., Deliarnoor, N. A., & Resnawaty, R. (2023). Undang-undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia: Stagnasi atau Revisi. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(2), 250–260.
- Basrowi, R. W. Rahayu E.M. Khoe. L.C. Wasito E & Sundjaya T. 2021. *The Road to Healty Ageing: What has Indonesia Achieved So Far?* *Nutrients*, 13 (10).
- Haerudin. (2022). Sasaran dan Mekanisme Program Atensi Lanjut Usia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji. Jawa Tengah: *Jurnal Equilibrium UNIMUSH*.
- Jaury Douglas Pardomuan, and Irwan Triadi. (2024). "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Kelompok Usia Rentan Di Indonesia Berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan". *Pemuliaan Keadilan* 1 (4):143-57. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.205>.
- Kemensos. (2021). *Pedoman Operasional Atensi Lanjut Usia*. Jakarta: Kemensos. Diakses dari: <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16384414877504.pdf>

BPK. (2023). LHP Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (S.D Triwulan III) pada Kemensos dan Instansi Lain terkait. Jakarta: Auditor Keuangan Negara III.

BPS. (2024). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

TNP2K. (2020). Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial Analisis Data Skuner. Diakses dari: [https://86093laporan_studi_lansia-analisis_data_sekunder\(2\).pdf](https://86093laporan_studi_lansia-analisis_data_sekunder(2).pdf)

Triyanto, J & Panjawa J.L (2020). Determinan Keterlibatan Lansia Dalam Pasar Kerja di Kabupaten Sragen. Jurnal litbang Sukowati; Media Penelitian dan Pengembangan 3 (2). 10.

Tuwu, D., & Tarifu, L. (2023). Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga Kesehatan Lanjut Usia. Journal Publicuho, 6(1), 20–29.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Vu, L. H., & Nguyen, T.-A. (2021). Elderly Poverty in Vietnam: Trends and Determinants. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 526–543. <https://doi.org/10.25133/jpssv292021.03>

Waluyo, Bejo & Khoirunnurrofik. (2021). Hubungan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Non Tertinggal. *Depok: Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4) 361-373.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

